



Kolaborasi Antara TNI, Pemerintah dan Masyarakat dalam Memberikan Bantuan Medis Kepada Penduduk Pesisir dengan Menggunakan Kapal Rumah Sakit Apung dan Kapal Bantu Rumah Sakit

Mohamad Arif Fauzi¹, Landosar Parsaulian², Endah Palupi³, Edi Susilo⁴

¹Sekolah Staff dan Komando TNI Angkatan Laut, ^{2,3,4}Strategi Operasi Laut Politeknik Angkatan Laut, Indonesia

E-mail: docter_ariffauzi@yahoo.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2023-07-12 Revised: 2023-08-22 Published: 2023-09-02	The use of military defense equipment in disaster operations on a domestic, regional and global scale has become indispensable for all countries, especially for countries that have a high level of disaster vulnerability. So for Indonesia, the use of the TNI's defense equipment is highly expected in efforts to prevent and manage disasters throughout the Indonesian archipelago. In addition to the defense equipment used as a hospital ship by the TNI in disaster relief missions, it turns out that there are also hospital ship donations provided by the government in carrying out relief missions, these ships are known as floating hospital ships. The existence of this hospital ship is a clear proof of solidarity and joint efforts to increase the capacity of health services in areas that need it. As for this journal article in its authorship, it uses a qualitative approach model with a descriptive method of analysis through literature research (library research). From the results of this analysis, data was generated that collaboration between the TNI, the government and the community in an effort to provide medical assistance to residents of coastal areas of Indonesia would create a more responsive and effective system in overcoming existing challenges, especially facing disasters.
Keywords: <i>Collaboration;</i> <i>TNI;</i> <i>Government;</i> <i>Public;</i> <i>Floating Hospital Ship;</i> <i>Hospital Auxiliary Vessel.</i>	
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2023-07-12 Direvisi: 2023-08-22 Dipublikasi: 2023-09-02	Penggunaan alutsista militer dalam operasi kebencanaan dalam skala domestik, regional maupun global sudah menjadi hal yang sangat diperlukan bagi seluruh negara, khususnya bagi negara yang memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi. Maka bagi Indonesia, penggunaan alutsista TNI menjadi hal yang sangat diharapkan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana di seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Selain alutsista yang dimanfaatkan sebagai kapal rumah sakit oleh TNI dalam misi perbantuan bencana, ternyata ada juga sumbangan kapal rumah sakit yang diberikan oleh pemerintah dalam menjalankan misi perbantuan, kapal tersebut dikenal dengan kapal rumah sakit apung. Keberadaan kapal rumah sakit ini merupakan bukti nyata solidaritas dan upaya bersama untuk meningkatkan kapasitas layanan kesehatan di wilayah yang membutuhkan. Adapun artikel jurnal ini dalam kepenulisannya menggunakan model pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis melalui kajian pustaka (<i>library reserach</i>). Dari hasil analisis tersebut dihasilkan data bahwa adanya kolaborasi antara TNI, pemerintah dan masyarakat dalam upaya memberikan bantuan medis kepada penduduk pesisir wilayah Indonesia akan menciptakan sistem yang lebih tanggap dan efektif dalam mengatasi tantangan yang ada khususnya menghadapi kebencanaan.
Kata kunci: <i>Kolaborasi;</i> <i>TNI;</i> <i>Pemerintah;</i> <i>Masyarakat;</i> <i>Kapal Rumah Sakit</i> <i>Apung;</i> <i>Kapal Bantu Rumah Sakit.</i>	

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, menjadikan Indonesia memiliki kondisi geografis yang unik. Secara astronomi Indonesia terletak antara 6° LU - 11° LS dan 95° BT - 141° BT. Selain itu Indonesia juga terletak diantara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, diantara Benua Asia dan Benua Australia serta berada diantara pertemuan dua rangkaian pegunungan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Hal ini tentunya menjadikan Indonesia terletak di daerah tropis yang panasnya merata sepanjang tahun sehingga menjadikan Indonesia mem-

punyai dua musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau.

Adanya kondisi iklim tersebut menyebabkan 2 dampak yang harus diterima oleh negara ini. Dari dampak positif, Indonesia mempunyai tanah yang sangat subur, apa yang ditanam akan selalu tumbuh berbuah. Adapun dampak negatifnya Indonesia selalu dilanda bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan kekeringan. Tentunya hal ini tidak bisa diabaikan, karena bila kondisi ini terus menerus diabaikan akan menyebabkan kerusakan di seluruh lingkungan alam sekitar.

Sepanjang tahun 2021, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah selesai melakukan verifikasi dan validasi data bencana dari seluruh provinsi dan kabupaten atau kota, data yang dihimpun dari seluruh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) selama tahun 2021 menghasilkan data bahwa telah terjadi 5.402 kejadian bencana. Ternyata dari kejadian sepanjang tahun 2021 dunia global juga telah mengalami bencana hidrometeorologi. Dalam menghadapi dan merespon bencana hidrometeorologi ini, pemerintah bertanggung jawab untuk mengembangkan sistem peringatan dini yang efektif, membangun infrastruktur tahan bencana, serta menyusun rencana tanggap darurat yang komprehensif. Selain itu juga pemerintah juga harus memastikan adanya koordinasi yang baik antar lembaga terkait, seperti Badan BNPB, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), TNI, POLRI, BPBD serta pihak-pihak terkait lainnya dalam memastikan langkah-langkah mitigasi, pemulihan dan rehabilitasi yang efektif.

Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dari pemerintah, khususnya dalam mengerahkan pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) melalui kegiatan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), adapun dasar hukum TNI dalam melaksanakan tugas OMSP tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, isi dari Undang-Undang tersebut juga mengamanatkan kepada pemerintah untuk dapat melindungi masyarakat dari dampak bencana serta mengkoordinasikan upaya penanggulangan bencana. Dalam hal ini, TNI berperan sebagai bagian dari sistem penanggulangan bencana nasional, dengan tugas utama dalam memberikan bantuan kemanusiaan, logistik, evakuasi dan pemulihan pasca bencana.

Selain itu TNI juga bekerja sama dengan BNPB dan instansi terkait lainnya untuk menjalankan tugas - tugasnya secara efektif dan efisien guna melindungi dan membantu masyarakat yang terkena dampak bencana. Hal tersebut sebagai perwujudan dari Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dalam peraturan ini dijelaskan bahwa TNI merupakan salah satu unsur pendukung dalam penanggulangan bencana dan dapat dikerahkan untuk membantu BNPB sesuai dengan kebutuhan. Dalam waktu mendatang diprediksi akan terjadi peningkatan partisipasi TNI dalam menjalankan OMSP, hal ini sejalan dengan menurunnya

ancaman tradisional seperti invasi atau agresi militer dari luar negeri terhadap Indonesia. Ancaman yang muncul saat ini lebih bersifat nontradisional seperti pemanasan global dan bencana alam, ancaman nontradisional tersebut merupakan hasil dari degradasi lingkungan hidup dan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. Jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, diperkirakan ancaman nontradisional akan terjadi peningkatan (Buku Putih Pertahanan, 2015).

Dengan kemampuan alutsista yang dimiliki oleh TNI, seperti kecepatan dan ketepatan serta daya angkut dan kemampuan akses ke daerah terpencil, hal ini menjadikan TNI dapat merespon dengan cepat dan efektif dalam situasi darurat. Melalui penggunaan alutsista TNI yang efisien dan terkoordinasi, maka pemerintah dapat bekerja sama dengan berbagai pihak untuk meminimalkan dampak bencana, khususnya kerjasama yang dilaksanakan oleh TNI dengan pemerintah dan masyarakat dalam bersinergi menjalankan tugas OMSP. Sinergitas tersebut bisa diwujudkan dalam bentuk pengerahan terhadap alutsista yang dimiliki oleh TNI beserta pemerintah dan masyarakat, seperti TNI mengerahkan kapal bantu rumah sakitnya dan pemerintah mengerahkan kapal rumah sakit apung dalam menjalankan tugas OMSP. Sehingga pentingnya artikel jurnal ini membahas terkait dengan kolaborasi antara TNI, pemerintah dan masyarakat dalam memberikan bantuan medis kepada penduduk pesisir dengan menggunakan kapal rumah sakit apung dan kapal bantu rumah sakit.

II. METODE PENELITIAN

Metode dalam kepenulisan artikel jurnal ini menggunakan model pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis melalui kajian literature (*library reserach*). Dengan adanya kajian literature, penulis dapat memperoleh data dan pemahaman yang komprehensif tentang topik pembahasan, selain itu penulis juga dapat mengidentifikasi kekosongan pengetahuan dan merumuskan pertanyaan pembahasan yang tepat (Hart, 1998). Kajian literatur telah menjadi metode utama dalam mengkaji penggunaan alutsista untuk menghadapi bencana. Kajian literatur juga dimungkinkan untuk memahami secara mendalam tentang penggunaan alutsista yang efektif sehingga berhasil dalam mengatasi bencana.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia terletak di wilayah yang strategis dan subur akan tetapi Indonesia juga terletak di wilayah yang rawan akan bencana alam, hal ini tentunya keadaan Indonesia sama persis seperti negara Jepang. Jepang dikenal sebagai salah satu negara yang secara efektif menghadapi berbagai bencana alam, seperti gempa bumi, tsunami dan badai tropis sehingga mereka telah mengembangkan sistem peringatan dini yang canggih, menciptakan inovasi infrastruktur tahan gempa dan juga membuat program evakuasi yang terorganisir dengan baik. Teknologi yang digunakan negara Jepang untuk mitigasi bencana adalah *Shinbashira*, *Shaking Table*, *Fugaku* (komputer cepat), *G-Cans*, Peringatan dini dan Drone. Dengan demikian pemanfaatan teknologi dalam upaya penanggulangan bencana di negara Jepang mengacu pada empat prinsip mitigasi yakni *Recovery*, *Mitigation*, *Preparedness* dan *Response* (Janer, 2022).

Selain itu Jepang juga memiliki budaya yang kuat dalam menghadapi bencana alam, hal ini tentunya tidak lepas dari Jepang membangun kesadaran masyarakat terhadap persiapan dalam menghadapi keadaan darurat. Tentunya Indonesia sebagai negara yang sering dilanda bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi dan banjir setidaknya dapat mempelajari apa yang telah Jepang terapkan dinegaranya dalam membangun ketahanan bencana yang holistik. Dengan keadaan Jepang yang rawan bencana, Jepang juga memanfaatkan semua asset pertahanannya untuk penanggulangan bencana. Segala sumber daya yang dimiliki oleh Jepang dapat dialihfungsikan untuk berperan dalam membantu bencana di negaranya, namun dalam pengadaannya tetap mengacu kepada kekuatan pertahanan secara tradisional. Kebijakan penanggulangan bencana alam di Jepang mengacu kepada kebutuhan domestik, regional dan global yang mengedepankan kebutuhan medis, komando kontrol terkoordinir dan kemampuan transportasi dan evakuasi berskala besar. Kapal Rumah Sakit menjadi platform solusi bagi Jepang untuk membantu meningkatkan kemampuan Jepang dalam penanggulangan bencana domestik. Kapal Rumah Sakit sudah dulu menjadi solusi kebencanaan skala regional bagi negara Jepang, hal ini bisa dilihat pada tahun 2013 telah terjadi bencana *Super Typhoon Yolanda* yang melanda Philippines dan Jepang mengirimkan bantuan Kapal Rumah Sakit *JS Tomodachi* dengan kapasitas 10.000 Ton, selain itu China juga

mengirimkan Kapal Rumah Sakit *Peace Ark* dengan kapasitas 14.000 Ton sebagai bantuan kemanusiaan untuk Philippines.

Penggunaan alutsista TNI dalam situasi bencana telah terbukti sangat penting dan berdampak signifikan dalam memberikan bantuan dan dukungan kepada masyarakat yang terdampak. Dalam penanggulangan bencana, TNI menggunakan berbagai jenis alutsista seperti helikopter, kapal perang dan kendaraan lapis baja untuk dapat membantu evakuasi korban, pengiriman bantuan logistik, serta mendukung operasi pemulihan pasca bencana. Dasar hukum TNI untuk mengerahkan alutsistanya dalam penanggulangan bencana alam, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang kedudukan, tugas, wewenang, organisasi dan pengelolaan TNI dalam pasal 7 ayat 2 yang menyebutkan bahwa TNI juga dapat ditugaskan untuk membantu tugas – tugas pembangunan nasional, termasuk dalam penanggulangan bencana.
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana di Indonesia. Dalam pasal 21 ayat 2 menyebutkan bahwa dalam situasi tertentu, alutsista TNI dapat digunakan untuk membantu menanggulangi bencana sesuai dengan apa yang ada di dalam peraturan perundang – undangan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 *jo* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 pasal 61 menyebutkan bahwa TNI dapat diminta untuk membantu dalam penanggulangan bencana dengan menggunakan alutsista sesuai dengan kebutuhan dan urgensi.

Penggunaan alutsista militer dalam operasi kebencanaan dalam skala domestik, regional maupun global sudah menjadi hal yang sangat diperlukan bagi seluruh negara, khususnya bagi negara yang memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi. Maka bagi Indonesia, penggunaan alutsista TNI menjadi hal yang sangat diharapkan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana di seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Dalam menjalankan kolaborasinya antara TNI, pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi bencana, pemerintah Indonesia telah mengerahkan segala upayanya dalam mengatasi berbagai bencana di wilayah pesisir Indonesia dengan mengerahkan beberapa kapal rumah sakit apung yang dimilikinya, sedangkan TNI juga mengerahkan beberapa alutsistanya (kapal bantu rumah sakit),

adapun alutsista milik TNI yang dikerahkan tersebut antara lain:

1. KRI Rumah Sakit dr Soeharso (990) diluncurkan pertama kali pada tahun 2003 dengan nama sebelumnya adalah KRI Tanjung Dalpele (972). KRI Rumah Sakit dr Soeharso berbobot 11.394 ton jika kosong dan 16.000 ton jika terisi penuh. Kapal ini memiliki panjang 122 meter, lebar 22 meter dan draft 4,9 meter. Selain itu KRI Rumah Sakit dr Soeharso juga memiliki geladak yang panjang dan luas sehingga mampu mengoperasikan dua buah helikopter sekelas Super Puma sekaligus. KRI Rumah Sakit dr Soeharso dilengkapi dengan sebuah hanggar untuk menampung helikopter dan sebagai tempat perawatan terhadap helikopter tersebut. Adapun fasilitas di dalam KRI Rumah Sakit dr Soeharso yaitu terdapat 1 ruang UGD, 1 ruang ICU, 1 ruang *post operasi*, 3 ruang bedah (2 steril, 1 non steril), 6 ruang poliklinik, 14 ruang penunjang klinik dan 2 ruang perawatan dengan kapasitas masing-masing 20 tempat tidur. Kapal ini memiliki 75 Anak Buah Kapal (ABK), 65 staf medis dan mampu menampung 40 pasien rawat inap. Jika dalam keadaan darurat, KRI Rumah Sakit dr Soeharso juga dapat menampung 400 pasukan dan 3000 penumpang. Dalam fungsinya sebagai kapal angkut, KRI Rumah Sakit dr Soeharso mampu mengangkut 14 truk atau tank dengan bobot per truk atau tank 8 ton, 3 helikopter tipe Super Puma, 2 *Landing Craft Unit* (LCU) tipe 23 M dan 1 *hovercraft*. Sedangkan di persenjataan, KRI Rumah Sakit dr Soeharso dilengkapi senjata 2 pucuk meriam Penangkis Serangan Udara (PSU) Rheinmetall 20 mm
2. KRI Rumah Sakit dr Wahidin Sudirohusodo (991) diluncurkan pada tahun 2021. KRI Rumah Sakit dr Wahidin Sudirohusodo mempunyai panjang 124 meter, lebar 21,8 meter dan displacement 7.290 ton, KRI Rumah Sakit dr Wahidin Sudirohusodo mampu melaju dengan kecepatan maksimal 18 knot, kecepatan jelajah 14 knot dan kecepatan ekonomis 12 knot (22 km per jam). Selain itu KRI Rumah Sakit dr Wahidin Sudirohusodo memiliki kemampuan berlayar hingga 30 hari penuh dengan jangkauan 10.000 mil laut. Kemampuan kapasitas angkut total personel 643 orang, termasuk 159 pasien. Mobilitas untuk pelaksanaan misi evakuasi medis juga ditunjang dengan kemampuan mengangkut
3. KRI Rumah Sakit dr Radjiman Wedyodiningrat (992) diluncurkan pada tahun 2022 dengan memiliki lebar 22 meter, panjang 122 meter dengan bobot 11.394 ton dan mampu membawa 163 anak buah kapal, 158 pasien, 280 sukarelawan serta mampu bertahan selama 30 hari dilaut dengan bantuan 3 unit helikopter. KRI Rumah Sakit dr Radjiman Wedyodiningrat mempunyai panjang kurang lebih sekitar 124 meter, dengan bobot berat 7.300 ton. KRI Rumah Sakit dr Radjiman Wedyodiningrat mampu melaju dengan kecepatan 18 knot, sementara kapasitasnya mampu membawa 163 ABK, pilot dan kru helikopter 18 orang, tamu VVIP 1 orang, staf medis 66 orang, pasien 158 orang dan sukarelawan 280 orang. Kapal ini juga mampu bertahan selama 30 hari di laut dengan kemampuan muat material 3 unit helikopter.

Selain kapal bantu rumah sakit milik TNI, pemerintah juga mengerahkan beberapa kapal rumah sakit apung yang dimanfaatkan juga sebagai misi perbantuan akibat bencana. Keberadaan kapal rumah sakit ini merupakan bukti nyata solidaritas antara pemerintah, masyarakat dan TNI dalam upaya bersama untuk meningkatkan kapasitas layanan kesehatan di daerah yang membutuhkan. Adapun kapal rumah sakit apung tersebut, antara lain :

1. Rumah Sakit Terapung Ksatria Airlangga
Rumah Sakit Terapung Ksatria Airlangga beroperasi sejak tahun 2016 dengan memiliki berbagai fasilitas sebagaimana rumah sakit pada umumnya, fasilitas tersebut diantaranya yaitu gudang obat, laboratorium, ruang tim medis, 2 kamar operasi, ruang pulih sadar dan sterilisasi alat, administrasi, ruang pengemudi dan ruang anak buah kapal serta ruang dapur. Rumah Sakit Terapung Ksatria Airlangga telah memberikan layanan kesehatan berupa operasi sebanyak 2.449 dan layanan spesialis lainnya sebanyak 14.478.
2. Rumah Sakit Apung Nusa Waluya 2
Rumah Sakit Apung Nusa Waluya 2 mulai beroperasi pada November 2018 dengan dimensi kapal 23 x 45 meter, Rumah Sakit Apung Nusa Waluya 2 telah melaksanakan operasinya di wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku (Pulau Tanimbar, Molu Maru, Fordata dan Yamdena). Rumah Sakit Apung Nusa Waluya 2 dilengkapi dengan fasilitas UGD, apotik, rekam jantung elektro-

kardiografi atau EKG, USG abdomen, laboratorium, radiologi, 2 kamar bedah, ICU, X-Ray (Rontgen), ruang resusitasi, ruang konsultasi, klinik gigi, klinik mata, ruang pemeriksaan pasien dan dilengkapi dengan 50 ranjang rawat inap.

3. Rumah Sakit Apung dr Lie Dharmawan

Rumah Sakit Apung dr Lie Dharmawan beroperasi sejak Maret 2013 dengan dimensi kapal 6,5 x 23,5 meter. Layanan yang disediakan yaitu pelayanan medis dasar dan lanjut (bedah minor dan mayor) selain itu juga ada fasilitas EKG, USG, laboratorium, kamar operasi, ruang resusitasi dan ruang pemeriksaan pasien.

4. Rumah Sakit Apung Lie Dharmawan 2

Rumah Sakit Apung Lie Dharmawan 2 memulai pelayaran perdananya pada September 2022. Rumah Sakit Apung Lie Dharmawan 2 merupakan pengganti dari Rumah Sakit Apung Lie Dharmawan yang karam pada 16 Juni 2021 di Selat Sape saat melakukan pelayanan medis.

5. Klinik Apung Said Tahuleley

Klinik Apung Said Tahuleley merupakan hasil kerja sama antara Lazismu dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI. Klinik Apung Said Tahuleley telah beroperasi di beberapa wilayah perairan Maluku diantaranya di Salahutu, Maluku Tengah, Negeri Sepa, Amahai, Maluku Tengah, Huamual dan Seram Bagian Barat.

6. KM Gandha Nusantara 1 dan 2

KM Gandha Nusantara 1 dan 2 mulai beroperasi sejak Agustus 2019 di wilayah perairan Sumenep. KM Gandha Nusantara 1 dan 2 merupakan hasil project pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memulai pengembangan kapal rumah sakit terapung yang berfungsi sebagai solusi dalam meningkatkan kesehatan masyarakat di wilayah kepulauan terpencil.

Kolaborasi antara TNI, pemerintah dan masyarakat umum memiliki peranan yang penting dalam meningkatkan kesehatan dan penanggulangan bencana di wilayah perairan terpencil Indonesia. TNI memiliki keahlian dan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung upaya ini, seperti personel yang terlatih dan kapal perang yang dapat digunakan untuk melakukan patroli dan operasi penyelamatan. Pemerintah sebagai pengelola negara juga berperan penting dalam memberikan dukungan kebijakan, anggaran dan kerangka kerja yang

diperlukan untuk mengatur dan mengoordinasikan upaya ini.

Melalui kolaborasi ini, masyarakat umum juga turut berperan aktif dalam meningkatkan kesehatan dan penanggulangan bencana di wilayah perairan terpencil. Masyarakat juga dapat dilibatkan dalam program edukasi kesehatan dan keselamatan, seperti pelatihan pertolongan pertama, penggunaan alat keselamatan dan pencegahan penyakit yang terkait dengan lingkungan perairan. Selain itu, masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam upaya pengawasan dan pelaporan terhadap aktivitas yang mencurigakan atau potensial menyebabkan bencana di wilayah perairan tersebut.

Kolaborasi ini memungkinkan TNI, pemerintah dan masyarakat untuk saling melengkapi dalam upaya meningkatkan kesehatan dan penanggulangan bencana di wilayah pesisir Indonesia. Dengan memadukan keahlian, sumber daya dan partisipasi aktif dari semua pihak, hal ini akan dapat menciptakan sistem yang lebih tanggap dan efektif dalam mengatasi tantangan yang ada. Selain itu, kolaborasi ini juga dapat memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antara TNI, pemerintah dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan di wilayah pesisir dan terpencil Indonesia, serta mengurangi dampak negatif dari bencana yang mungkin terjadi.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Kapal bantu rumah sakit TNI memainkan peran yang sangat penting dalam memberikan bantuan medis dan kesehatan kepada korban bencana. Dalam situasi darurat, kapal rumah sakit ini dapat didayagunakan untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang terdampak, terutama di daerah terpencil yang sulit dijangkau. Dengan dilengkapi fasilitas medis yang lengkap dan tenaga medis yang terlatih, kapal rumah sakit TNI mampu memberikan perawatan medis yang mendesak kepada korban bencana, membantu mengurangi jumlah kematian dan mencegah penyebaran penyakit.

Selain itu pemerintah juga berperan penting dalam mendukung kesehatan masyarakat di wilayah terpencil dengan menyediakan rumah sakit apung. Rumah sakit apung merupakan fasilitas kesehatan yang dibangun di atas kapal dan dapat dioperasikan di daerah terpencil ataupun pulau-pulau terisolasi. Kontribusi pemerintah dalam

membangun rumah sakit apung menunjukkan komitmen untuk dapat meningkatkan akses kesehatan bagi masyarakat yang sulit dijangkau. Disisi lain masyarakat juga dapat berperan dalam mendukung operasional rumah sakit apung yang disediakan oleh pemerintah, baik melalui partisipasi dalam pembangunan, pemeliharaan atau penyediaan tenaga medis dan sukarelawan. Dengan adanya rumah sakit apung, kesehatan masyarakat di wilayah terpencil dapat ditingkatkan dan mereka dapat menerima pelayanan medis yang memadai tanpa harus melakukan perjalanan jauh.

Sehingga dengan adanya kapal rumah sakit apung milik pemerintah dan kapal bantu rumah sakit milik TNI dalam memberikan bantuan bencana alam, negara mampu memberikan pelayanan kesehatan yang efektif dan tepat waktu kepada korban bencana di wilayah terpencil guna meminimalisir jatuhnya korban jiwa.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Kolaborasi Antara TNI, Pemerintah dan Masyarakat dalam Memberikan Bantuan Medis Kepada Penduduk Pesisir dengan Menggunakan Kapal Rumah Sakit Apung dan Kapal Bantu Rumah Sakit.

DAFTAR RUJUKAN

- Anardianto, 2023. "Klinik Apung Said Tuhuley, Pelayanan Kemanusiaan untuk Masyarakat Indonesia Timur". Dalam: <https://muhammadiyah.or.id/klinik-apung-said-tuhuley-pelayarankemanusiaan-untuk-masyarakat-indonesia-timur/>
- Abdul Muhari, 2022. "BNPB Verifikasi 5.402 Kejadian Bencana Sepanjang Tahun 2021". Dalam: <https://bnpb.go.id/berita/bnpb-verifikasi-5-402kejadian-bencana-sepanjang-tahun-2021>
- Andreas W. Finaka, 2022. "Kapal Rumah Sakit Milik Indonesia". Dalam: <https://Indonesiabaik.id/index.php/infografis/kapal-rumah-sakit-milikIndonesia>
- Anthony W. Holmes, 2016. "Strategic Mercy: The Case for Japanese Hospital Ships". Dalam:

<https://thediplomat.com/2016/06/strategic-mercy-the-casefor-japanese-hospital-ships/>

- Bisnis News, 2019. "Menhub Budi Karya Lepas KM Gandha Nusantara 1 dan 2 Sebagai RS Terapung di Sumenep". Dalam: <https://bisnisnews.id/detail/berita/menhub-budi-karya-lepas-km-gandhanusantara-1-dan-2-sebagai-rs-terapung-di-sumenep>
- BNPB. "Potensi Ancaman Bencana". Dalam: <https://bnpb.go.id/potensi-ancamanbencana>
- Buku Putih Pertahanan Indonesia, 2008. Jakarta: Dephan RI
- Kenneth R. "Hospital Ships: A Transformational Necessity for Japan". NDS Security Reports
- Doctor Share. "Rumah Sakit Apung dr. Lie Dharmawan". Dalam: <https://www.doctorshare.org/program-jangkapendek/rsapungdrliedharmawan>
- Doctor Share. "Rumah Sakit Apung Nusa Waluya II". Dalam: <https://www.doctorshare.org/program-jangka-panjang/rs-apung-nusawaluyaii>
- Hart, 1998. "Doing a Literature Review: Releasing the Social Science Research Imagination". SAGE Publications Ltd.
- Janer, Dicho Helmi, 2022. "Mitigasi Bencana Teknologi Atau Natech Di Jepang". Skripsi thesis, Sekolah Tinggi Bahasa Asing JIA
- JPNN, 2022. "Kenang Bahenol, Rumah Sakit Apung dr Lie Dharmawan II Berlayar lagi ke Kepulauan Seribu". Dalam: <https://www.jpnn.com/news/kenang-bahenol-rumah-sakit-apung-dr-lie-dharmawan-ii-berlayar-lagi-ke-kepulauan-seribu>
- Kemenlu Dalam <https://kemlu.go.id/nursultan/id/pages/geografi/41/etc-menu>
- Redaksi, 2021. "Ini fasilitas di Rumah Sakit terapung Ksatria Arilangga". Dalam: <https://darilaut.id/berita/ini-fasilitas-di-rumah-sakit-terapung-ksatria-airlangga>
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Bencana

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008
Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan
Nasional Penanggulangan Bencana Yang
Mengatur Tentang Struktur Organisasi Dan
Tata Kerja BNPB

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang
Penanggulangan Bencana

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang
Tentara Nasional Indonesia (TNI)